

**PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF WANITA
MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
DI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
PERIODE II TAHUN 2004**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Srata Satu Sosial Islam**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

ASIH PUJI HASTUTI

01230697

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Mokh. Nazili, M. Pd
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : **Persetujuan Skripsi Saudara Asih Puji Hastuti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku Dosen Pembimbing, sependapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asih Puji Hastuti
NIM : 01230697
Fak/Jur : Dakwah/Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : **Pemberdayaan Ekonomi Produktif Wanita Melalui Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahap II Tahun 2004**

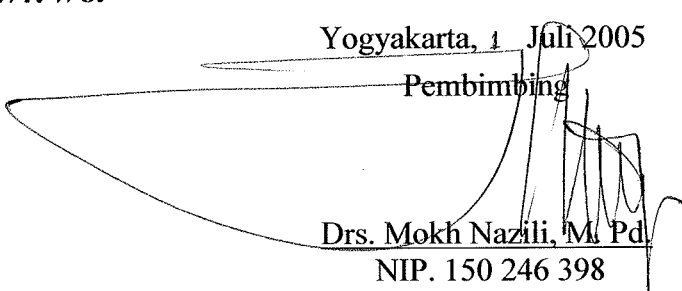
sudah dapat diajukan kepada fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosial Islam.

Skripsi saudara tersebut telah dimunaqosyahkan dan dipertanggungjawabkan di depan sidang munaqosyah. Demikian nota dinas kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juli 2005

Pembimbing


Drs. Mokh Nazili, M. Pd
NIP. 150 246 398



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Laksda Adisatripto Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor: -

Skripsi dengan judul: **PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF WANITA MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI PERIODE II TAHUN 2004**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

ASIH PUJI HASTUTI
NIM. 01230697

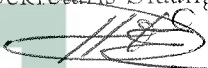
Telah diuji di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Juni 2005 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Drs. Suisyanto, M. Pd
NIP. 150228025

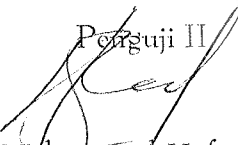
Sekretaris Sidang


Drs. Moh Abu Suhud, M. Pd
NIP. 150241646


Penguji I / Pembimbing


Drs. Moh Nazili, M. Pd
NIP. 150246398

Penguji II

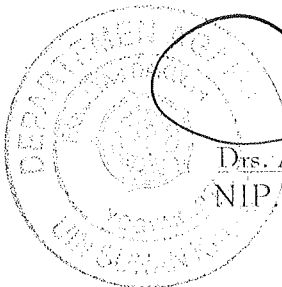

Drs. Muhammad Hafid, M. Pd
NIP. 150240525

Penguji III


Suyanto, S. Sos, M. Si
NIP. 150233520

Yogyakarta, 28 Juni 2005
UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH

DEKAN




Drs. Afid Rifai, M.S
NIP. : 150222293

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ (النساء : ٣٢)

Artinya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagian orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (An Nisa': 32).*

Tragedi sebenarnya dalam kehidupan bukanlah kematian, namun kematian dalam diri kita ketika masih hidup.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Al-'Aliyy, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), hlm. 66.

** Joe Rubino, *The Power to Succeed*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), hlm. 92.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ *Almamaterku*
- ❖ *Bapak Ibu tercinta, atas segala doa, perhatian, semangat, dorongan, serta kasih sayang yang tak terhingga, engkau lah yang terbaik.*
- ❖ *Adikku Burhan dan Fandi, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan program studi. Semoga kesuksesan hidup akan selalu menyertai kalian dan kelak menjadi anak yang dapat dibanggakan. Amin.*
- ❖ *Om Tus, Asti, Wiwik, Awit yang banyak memberikan bantuan dan dukungan serta seluruh teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَالِمَهُ الْبَيَانَ،
وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيِ الرَّسُولِ الْمُؤَيَّدِ بِبُرْهَانِ الْقُرْآنِ،
سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ أَرْسَلَهُ
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

Berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah swt, penelitian saya tentang pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PPK (Program Pengembangan Kecamatan) terhadap wanita di Kecamatan Karanggede dapat terwujud dalam bentuk skripsi. Oleh sebab itu saya patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada saya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah saw, yang telah membawa manusia pada pencerahan.

Saya yakin atas petunjuk-Nya pula sehingga berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, kemudahan dan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan studi Strata Satu, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu saya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang

langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga patut saya sampaikan kepada Bapak Drs. Afif Rifai, MS, selaku dekan Fakultas Dakwah.

Terima kasih pula yang sebanyak-banyaknya saya haturkan kepada Bapak Drs. Suisyanto, selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Bapak Drs. Moh. Abu Suhud, M.Pd., selaku sekretaris jurusan, yang telah sudi menerima judul yang saya ajukan dan telah banyak memberikan masukan dan arah pemikiran terhadap penyusunan skripsi ini.

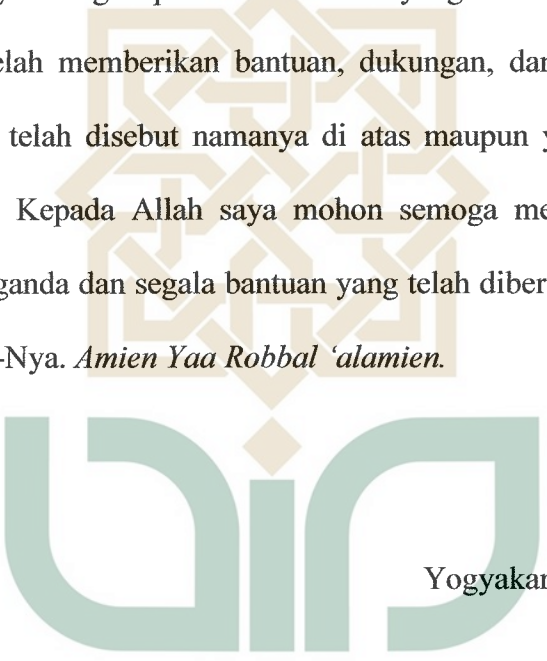
Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Drs. Fajrul Munawir, M.Ag, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan selalu meluangkan waktunya ketika saya mengkonsultasikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

Rasa hormat dan penghargaan yang tulus secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Drs. Mokh. Nazili, M. Pd., selaku pembimbing saya yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan dengan sangat teliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada kedua orang tua saya, ayahanda; Setyo Sujoko dan ibunda; Nurhidayah, yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a kehadirat Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan anaknya dalam menyelesaikan studi.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada seluruh pengurus PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang telah ikhlas menerima saya untuk meneliti di lembaga ini dan telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan sehingga penelitian yang saya lakukan dapat selesai dengan baik dan telah berwujud skripsi seperti ini.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan, baik kepada mereka yang telah disebut namanya di atas maupun yang tidak sempat disebutkan namanya. Kepada Allah saya mohon semoga mereka dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikannya itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. *Amien Yaa Robbal 'alamien.*



Yogyakarta, 28 Juni 2005
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Asih Puji Hastuti
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian	17
F. Kerangka Teoritik	
1. Paradigma Pemberdayaan	17
2. Pemberdayaan Ekonomi Wanita	21
3. Tinjauan Program Pengembangan Kecamatan	26
4. Kerangka Teoritik Respon	30
G. Metode Penelitian	
1. Subyek dan Obyek Penelitian	35

2. Metode Pengumpulan Data	36
3. Analisis Data	38
4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	38

**BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN
KECAMATAN**

A. Sejarah Berdirinya Program Pengembangan Kecamatan	40
B. Visi, Misi dan Tujuan	43
C. Program Kerja	47
D. Organisasi	49
E. Fasilitas Yang Dimiliki	52
F. Sumber Dana	54

**BAB III PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF WANITA DI
KECAMATAN KARANGGEDE**

A. Problematika Ekonomi Wanita	59
B. Langkah-langkah Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Wanita	
1. Kebijakan Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan	
a. Pelatihan Pelaku PPK	70
b. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Masyarakat	72
c. Sosialisasi.....	74
d. Pembentukan Kelompok	79
e. Tahap Perencanaan Program.....	80
f. Tahap Pelaksanaan Program.....	82
g. Tahap Evaluasi Program.....	83

2. Peningkatan Sumberdaya Wanita	
a. Ketentuan Mengenai Partisipasi Wanita dalam PPK	85
b. Kegiatan Ekonomi Produktif Wanita dalam PPK	86
C. Respon Masyarakat Terhadap PPK Dalam Upaya Pemberdayaan	
Ekonomi Produktif Wanita	92
D. Analisis Hasil Penelitian	94
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	101
C. Penutup	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memahami judul dalam skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Produktif Wanita Melalui Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Periode II Tahun 2004”, maka perlu diberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Wanita

Sebelum menguraikan istilah ini secara keseluruhan, terlebih dahulu akan dijelaskan satu persatu dari istilah tersebut. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu.¹ Imbuhan pada kata pemberdayaan memiliki arti yaitu berusaha meningkatkan kemampuan dengan melakukan sesuatu. Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut “*empowerment*”. Menurut William Webster, *empower* memiliki dua arti. Pertama berarti *to give power or authority to* yaitu memberikan kekuasaan atau kekuatan pada pihak lain. Sedangkan pada pengertian kedua *to give ability or enable* yaitu upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.²

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. VIII, 1996), hlm. 233.

² Onny S. Prijono, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 3.

Berikut ini beberapa istilah “pemberdayaan”, menurut Kusnaka Adimiharja pemberdayaan merupakan upaya menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif masyarakat dan mitranya.³

Ginandjar Kartasasmita mendefinisikan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu (potensi yang dimiliki masyarakat yang dikembangkan) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁴

Menurut Mubyarto, pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya. Bertolak dari hal tersebut, tidak hanya ekonomi yang meningkat tapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.⁵

Beberapa definisi yang dikemukakan tersebut, maka penyusun menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi kelompok wanita, dengan menumbuhkan kemandirian serta partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM dan SDA melalui Program Pengembangan Kecamatan sebagai wujud pemerataan pembangunan dari pemerintah, yang berupaya memberdayakan kelompok wanita yang

³ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan dan Implementasi*, (Bandung: Humaniora Utama Press, Cet.I 2001) hlm.10.

⁴ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CESINDO, Cet I, 1996), hlm. 145.

⁵ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Progam IDT dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hlm. 37.

memiliki usaha produktif dengan cara memberikan bantuan pinjaman dana bergulir yang berfungsi sebagai tambahan modal, dalam pelaksanaannya melalui bimbingan dari para pengurus PPK.

Pinjaman ekonomi produktif merupakan salah satu bagian dari program pengembangan kecamatan. Program Pengembangan Kecamatan itu sendiri dapat dikatakan merupakan lanjutan dari program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang disebut Inpres Desa Tertinggal (IDT) sebagai tindak lanjut Inpres No. 5 Tahun 1993.

Dana ekonomi produktif merupakan modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok miskin untuk kegiatan sosial ekonomi yang bersifat produktif. Pemanfaatannya disesuaikan dengan kemampuan, pengetahuan dan kemauan kelompok. Dana tersebut digulirkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh segenap anggota masyarakat yang tergolong miskin secara bergiliran. Hal itu berarti, bagi anggota kelompok masyarakat (pokmas), dana program tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada kelompok. Dana tersebut dapat dipinjam kembali oleh anggota lain dalam satu kelompok, atau oleh kelompok lain yang belum memperoleh bantuan dana tersebut. Dengan demikian dana tersebut dapat dikembangkan menjadi dana simpan-pinjam.⁶ Secara garis besar, ekonomi produktif yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan potensi SDA maupun SDM yang telah ada dengan bantuan dana dari pemerintah.

⁶ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.III, 2004), hlm. 51.

2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Periode II Tahun 2004

PPK merupakan program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung lebih lanjut Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang Desa Tertinggal. Secara khusus PPK dirancang untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif dan pembangunan sarana prasarana pedesaan. Program Pengembangan Kecamatan periode II dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Dan PPK tahun 2004 merupakan periode II tahap ketiga

Mengenai sasaran penerima PPK terutama adalah penduduk miskin. Sedangkan sasaran lokasi penerima PPK adalah kecamatan miskin dengan prioritas yang dipilih berdasarkan kriteria: (a). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa tertinggal relatif lebih banyak. (b). Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk miskin relatif lebih banyak.⁷

Pengelolaan PPK ini diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Pendekatan yang digunakan dalam PPK adalah pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat penerima bantuan diberi kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan melalui musyawarah.

Paradigma pengembangan kawasan alternatif ini menyangkut *community empowerment* yang pada akhirnya akan meningkatkan

⁷ Suara Merdeka, "Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Boyolali Phase I", Rabu, 19 Februari 2003.

kemampuan masyarakat untuk mengendalikan life-space (pola hidup), pasar dan meningkatkan kemampuan territorial self-determination-nya (kawasan jangkauannya).⁸

3. Kecamatan Karanggede

Kecamatan Karanggede merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Boyolali terdiri dari 10 kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Karanggede. Kecamatan ini termasuk salah satu kecamatan tertinggal yang mayoritas penduduknya sebagai petani yang terdiri dari 16 wilayah desa.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang telah disebutkan tersebut, maka judul Pemberdayaan Ekonomi Produktif Wanita Melalui Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Periode II Tahun 2004 adalah penelitian tentang pelaksanaan pemberdayaan wanita pada sektor ekonomi produktif dan respon masyarakat mengenai keikutsertaan wanita dalam program pengembangan kecamatan di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

B. Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan Indonesia diwadahi dengan baik dalam konsep politik “Trilogi Pembangunan”, yaitu tiga prasyarat yang terkait amat erat saling memperkuat dan saling mendukung, yaitu stabilitas nasional yang

⁸ Moelyanto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 130.

mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan melalui pemerataan (*growth via equity*), pemerintah melaksanakan strategi pembangunan ekonomi, yang senantiasa memihak pada kepentingan masyarakat miskin dan lemah. Masyarakat yang miskin dan lemah ini memperoleh dan memanfaatkan peluang untuk berusaha secara produktif, agar pada gilirannya membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.⁹ Kelompok masyarakat ini bukan dijadikan obyek semata melainkan sebagai subyek, yang dengan kemauan dan modal dari pemerintah mampu meningkatkan taraf hidupnya yang pada gilirannya menunjang program pemberdayaan pada sektor ekonomi menuju masyarakat yang berkeadilan sosial.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diartikan untuk mendorong perubahan struktural (*structural adjustment atau structural transformation*), yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan kepada kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, serta pemberdayaan

⁹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila : Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, Cet.I, 1997), hlm. 207.

sumber daya manusia.¹⁰ Faktor utama yang menjadi pendukung usaha pemberdayaan ekonomi adalah modal dan keahlian (skill), dengan mengandalkan kedua faktor tersebut maka bisa melakukan tindakan ekonomi produksi. Akan tetapi jika kegiatan produksi yang dilakukan berskala besar, maka faktor-faktor lain juga dibutuhkan, karena adanya tuntutan. Hubungannya dengan hal ini, jika ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat maka hal mendasar yang perlu dilakukan adalah pemberian bantuan dana, sehingga dengan modal yang ada dan keahlian tertentu maka tujuan kemandirian bisa tercapai.

Pengadaan modal bagi rakyat miskin tidaklah cukup dan kemungkinan akan gagal jika tidak disertai tindakan pengarahan yang berupa pendampingan komunitas, yang didalamnya bisa dimasukkan program pelatihan berwirausaha. Manajemen komunitas juga diperlukan, yang berfungsi sebagai alat kontrol dan pengukur keberhasilan.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, wanita merupakan sosok makhluk kedua setelah pria. Pengaruh kultur dan ideologi patriarki memetakan kedudukan wanita Indonesia dalam lingkup kebodohan dan keterbelakangan. Adanya perbedaan peran dan fungsi wanita, seringkali terjadi tindak pelanggaran terhadap hak asasi wanita, terpinggirkan dari wilayah kepemimpinan, ekonomi dan kebebasan dalam segala bentuk kehidupan.

Secara resmi dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke enam (Tahun 1994-1999) disusun sasaran pengembangan wanita berdasarkan arah

¹⁰Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998), hlm. 7.

dari Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa wanita baik sebagai warganegara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang.¹¹ Dengan adanya konstitusi yang memberikan akses bagi wanita Indonesia untuk berkembang, maka yang diharapkan adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Bukan tergantung dari pihak lain, melainkan dari potensi diri yang dimiliki.

Wanita di jaman modern saat ini, telah menduduki tempat-tempat yang cukup baik dalam lembaga sosial maupun dalam pemerintahan sebagaimana terdapat dalam mandat konstitusi. Bahwa kedudukan dan status wanita merupakan salah satu pilar prinsip non-diskriminasi terdapat pada pasal 27 yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹² Dengan adanya fakta hukum tersebut, maka wanita juga memiliki hak yang sama dan dijamin kepentingannya, berhak atas pekerjaan dan juga penghidupan yang layak. Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa’ ayat 32, mengenai persamaan hak kaum wanita dan pria :

¹¹ Atho’ Mudzhar. dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, Cet.I, 2001), hlm. 15.

¹² M. Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 82.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا عَلَىٰ وَاللِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا عَلَىٰ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النساء : ٣٢)

Artinya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagian orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (An Nisa': 32).

Namun disisi lain, wanita juga harus memiliki tanggung jawab mengurus dan mendidik anaknya, sebenarnya hak ini bukan hanya tugas wanita semata. Peran pria sebagai kepala rumah tangga juga memiliki kewajiban yang sama, namun memang ada kalanya posisi wanita tidak bisa digantikan seperti melahirkan dan menyusui. Hal yang perlu digaris bawahi adalah wanita bisa bekerja, namun tetap berperan aktif dalam keluarga, sehingga perlu adanya prinsip keseimbangan antara pekerjaan dengan keluarga.

Wanita cukup berpengaruh dalam pembangunan nasional. Karenanya, wawasan *women and development* memiliki kesimpulan bahwa posisi wanita akan lebih baik kalau struktural lebih adil, perubahan struktur menjadi alternatif untuk meningkatkan status, kedudukan dan peran wanita.¹³ Pemberian kesempatan dan motivasi pada diri wanita, akan menumbuhkan

¹³ *Ibid.*, hlm. 85.

adanya kesadaran dan kepercayaan diri, sehingga bakat dan keahlian akan muncul seiring dengan diubahnya kultur dan image bagi wanita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rad ayat 11 :

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Artinya :

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...

Di berbagai belahan dunia, wanita dinilai rendah, petugas sensus diinstruksikan untuk tidak memasukkan kerja rumah tangga wanita, formulir sensusnya pesannya jelas “Jangan menghitung kerja perempuan karena kerja wanita tidak diperhitungkan” jika pekerjaan rumah tangga ditambahkan kedalam angka-angka bagi GNP global, diperkirakan bahwa angka GNP global akan meningkat setidak-tidaknya sepertiga. Kerja yang dilakukan wanita kadang-kadang dilukiskan sebagai “tidak tampak” karena kerja itu tidak terekam secara statistik. Kerja wanita lebih dipandang sebagai menghidupi ketimbang penghasilan.¹⁴ Pada umumnya pendapatan yang diperolehnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Disamping dapat memenuhi kebutuhan keluarga, pendapatan wanita juga membantu meringankan suami, apalagi ketika suaminya sendiri kadang-kadang pada saat-saat tertentu tidak mempunyai penghasilan.¹⁵ Penghasilan yang dihasilkan

¹⁴ JC. Mosse terjemahan Hartian.W, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 58.

¹⁵ Dadang S Anshori. dkk, *Memperbincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. I, 1997), hlm. 184.

oleh wanita dalam lingkup rumah tangga akan menimbulkan suatu kemandirian, sehingga dengan adanya hal ini wanita akan makin bisa berperan dalam penentuan pengeluaran ekonomi keluarga maupun terhadap pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan adanya keikutsertaan dalam perekonomian keluarga, bertolak dari hal tersebut maka wanita kemudian memiliki kepercayaan diri dan memperkuat kedudukannya dalam keluarga bukan sebagai “pengikut dibelakang” tapi berkedudukan sebagai sosok mitra yang saling melengkapi.

Dari segi pemecahan praktis upaya menyelesaikan masalah gender dalam keluarga dapat dilakukan upaya program aksi yang melibatkan wanita diberbagai proyek peningkatan kaum wanita, keterlibatan ini dimasukkan dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum wanita terlibat dan menjalankan kekuasaan di sektor publik.¹⁶ Dari sisi pengembangan masyarakat, program peningkatan sumber daya wanita dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan bertujuan menumbuhkan kemandirian dan partisipasi aktif, sehingga hal ini akan menciptakan pembangunan ekonomi dari bawah. Dalam kenyataan, pembangunan dari bawah (*bottom up*) lebih efektif ketimbang program yang seringkali diaplikasikan oleh pemerintah (*top down*).

Upaya pemberdayaan tersebut, disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki wanita. Inti penyadaran terhadap wanita terletak pada bahwa mereka memiliki modal dan akses melalui program-program yang

¹⁶ Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 154.

dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah hanya berkedudukan sebagai penyedia dana sedangkan pelaksanaan lapangan diberikan pada pihak pendamping yang terlebih dahulu mengadakan identifikasi kebutuhan dari pihak yang akan diberdayakan. Melalui tindakan identifikasi, maka akan diketahui hal pokok yang diinginkan dan dibutuhkan oleh komunitas, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan acuan strategi pemberdayaan. Langkah-langkah pemberdayaan disesuaikan dengan potensi yang telah ada.

Setelah melakukan identifikasi kebutuhan kelompok sehingga timbul perencanaan cara pemenuhan kebutuhan tersebut, maka tindakan selanjutnya merumuskan kegiatan untuk mencapai sarannya. Selanjutnya menyiapkan kondisi dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan. Langkah berikutnya melaksanakan serta mengelola kegiatan-kegiatan yang direncanakan.¹⁷ Diharapkan dengan adanya hal ini maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan khususnya wanita yang telah menjadi prioritas pemberdayaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian ekonomi rakyat (*grassroots*).

Peluang ekonomi bagi wanita dengan memperoleh kredit modal usaha melalui investasi kredit sebesar 20 % untuk mengembangkan usaha kecil (KUK), pada umumnya partisipasi wanita dalam menikmati kredit ini masih kecil baru mencapai 25 %. Hal ini disebabkan kurangnya informasi fasilitas ini kepada wanita terutama di pedesaan dan sebagian disebabkan karena

¹⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Op. Cit.*, hlm. 48.

adanya persyaratan agunan yang sulit dipenuhi oleh wanita.¹⁸ Keadaan ini perlu adanya klarifikasi bahwasannya persyaratan untuk memperoleh kredit tidak sesulit yang dibayangkan. Hal ini menjadi penting, sebagai langkah awal untuk dapat menarik minat dan mengubah cara berfikir untuk dapat mengubah kondisi kehidupan yang dialami selama ini, menuju perubahan yang mengarah pada kesejahteraan.

Kredit merupakan suntikan dan bantuan sementara untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Peran dari kredit atau pinjaman dari luar ini adalah untuk menggantikan tabungan yang semestinya dihimpun dari kemampuan sendiri. Karenanya, kredit dalam putaran ekonomi, suatu saat atau secepatnya harus menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan meningkatkan kesejahteraan.¹⁹ Suatu saat kredit tersebut harus dihentikan, digantikan oleh kemampuan pemupukan modalnya sendiri. Kredit yang berkepanjangan dan tidak dapat menciptakan akumulasi modal sendiri untuk suatu kegiatan ekonomi, justru menciptakan ketergantungan hingga menjadi beban yang semakin memberatkan bagi si penerima kredit itu sendiri. Karena itu, mereka yang menerima kredit harus memahami pengertian tentang pinjaman dari luar ini. Harus dihindarkan adanya ketergantungan yang akan merugikan si penerima kredit itu sendiri.²⁰ Dengan adanya hal ini, maka upaya yang perlu dilakukan adalah penyadaran dan memotivasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, yang dimaksudkan disini adalah benar-benar ada kontrol sosial terhadap komunitas tersebut.

¹⁸ Dadang S. Anshori. dkk, *Op. Cit.*, hlm. 189.

¹⁹ Gunawan Sumodiningrat, *Op. Cit.*, hlm. 99.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

Pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, menciptakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Kegiatan ini dimaksudkan untuk merealisasikan dan mendukung Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang Desa Tertinggal. Tujuan utama bantuan modal kerja yang diberikan melalui program IDI, yaitu menanamkan prinsip monetisasi di pedesaan. Monetisasi merupakan dasar ke arah pemupukan modal.²¹ Secara khusus PPK dirancang untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif. Pengelolaan PPK ini diberikan secara langsung kepada masyarakat kecamatan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Secara global tujuan umum dari Program Pengembangan Kecamatan ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat yang ditempuh melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung di pedesaan. Sedangkan tujuan khususnya diantaranya; pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Kedua, meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Ketiga, menyediakan prasarana dan sarana bagi pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Keempat, meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat di

²¹ *Ibid.*, hlm. 108.

desa dan di kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.²²

Pendekatan yang dilakukan oleh PPK melalui usaha pemberdayaan, dimana masyarakat penerima bantuan diberikan kebebasan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan melalui musyawarah. Jadi, dalam suatu kelompok peminjam bisa bervariasi kegiatan ekonomi yang dilakukan. Hal ini karena disesuaikan dengan latar belakang kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh tiap peminjam. Sasaran utama penerima PPK adalah penduduk miskin, sedangkan lokasinya diprioritaskan pada kecamatan miskin yang memiliki jumlah desa tertinggal relatif lebih banyak atau yang memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih banyak. Dalam rancangan PPK diantaranya terdapat program bagi kaum wanita sebagai wujud nyata, bahwasannya wanita sebenarnya juga memiliki potensi untuk diberdayakan.

Beberapa hal yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi ketertarikan untuk meneliti pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program pengembangan kecamatan (PPK) tersebut diantaranya:

Pertama, kegiatan pemberdayaan melalui program pengembangan Kecamatan di Karanggede mengikutsertakan kelompok wanita, sehingga mewujudkan adanya partisipasi aktif wanita dalam usaha peningkatan mutu sumber daya manusia dan kesejahteraan menuju kemandirian.

Kedua, dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program pengembangan kecamatan di Karanggede, komunitas diberikan kebebasan

²² Depdagri, *Petunjuk Teknis Operasional PPK*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002, hlm.2.

dalam menentukan kegiatan ekonominya, sehingga tinggal melanjutkan bidang usaha sebelumnya bagi yang sudah berwirausaha.

Ketiga, program pengembangan kecamatan di Karanggede diterapkan secara bergulir dibatasi waktu peminjamannya, sehingga pada tiap periode perguliran dana berganti pula peminjamnya. Sehingga dengan adanya hal ini, maka akan memungkinkan terciptanya pemerataan dan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan yang kemudian mendukung laju pembangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif wanita melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana respon masyarakat yang mengikuti program ekonomi produktif, mengenai keikutsertaan wanita dalam Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif wanita melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui respon masyarakat yang mengikuti program ekonomi produktif, mengenai keikutsertaan wanita dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, maka hasilnya diharapkan akan bermanfaat dari berbagai segi, diantaranya:

1. Teoritis, penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan kontribusi di bidang pengembangan masyarakat sebagai wacana yang berhubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi.
2. Praktis, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karanggede dalam upaya pelaksanaan program berikutnya. Dan juga sebagai bahan perbandingan bagi praktisi pengembang masyarakat di masa mendatang.

F. Landasan Teori

1. Paradigma Pemberdayaan

Paradigma yang selama ini menjadi acuan Pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia yakni meletakkan peranan negara atau pemerintah pada posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Paradigma ini sangat tidak mempercayai kemampuan rakyat jelata dalam membangun diri dan masyarakat mereka sendiri.

Disamping itu, paradigma tersebut menghambat timbulnya kekuatan lokal sebagai sentral dalam perencanaan suatu pembangunan masyarakat yang berkesinambungan.²³

Pola kebijakan pemerintah yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas kebawah (*top-down*) daripada dari bawah keatas (*bottom-up*). Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang bersifat mendesak dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran-peran lain yang mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah.²⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan pasangan baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-contered* (*berpusat pada rakyat*), *participatory* (*partisipasi*), *empowering* (*pemberdayaan*), and *sustainable* (*keberlangsungan*)".²⁵

²³ Loekman Soetrisno, *Pemberdayaan Rakyat Dalam Masyarakat Madani, Dalam Membongkar Mitos Masyarakat madani*, Widodo Usman (et. al.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2000), hlm. 183-184.

²⁴ Harry Hikmat, *Op. Cit.*, hlm. 17.

²⁵ Robert Chambers, "*Poverty and Livelihoods: Whose Reality Sounts?*", dalam *Uner Kirdow dan Leonard Silk (ed). People From Impoverishment to Empowerment*, New York: New York University Press, 1995. Dikutip Dari Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Op. Cit.*, hlm. 142.

Empowerment menurut Paulo Freire merupakan suatu metodologi *concientization* yaitu suatu proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan politik yang ada dalam suatu masyarakat dan menyusun cara-cara untuk menghilangkan kondisi yang pasif dalam masyarakat. Jadi *empowerment* bukanlah sekedar hanya memberi kesempatan rakyat menggunakan sumber alam dan dana pembangunan saja, tapi *empowerment* lebih merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dan partisipasi. Sedangkan menurut Schumacer bahwa manusia mampu membangun diri mereka sendiri tanpa mengharuskan terlebih dahulu menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat.²⁶

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan. Pemberdayaan merupakan strategi pembangunan sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, sarana dan prasarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada

²⁶ Anggito Abimanyu, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: PAU-SE UGM bekerjasama dengan BPFE, 1999/2000, hlm. 136.

gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat itu sendiri.²⁷

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan serta berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*); kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); ketiga, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); keempat, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); dan kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).²⁸ Dengan adanya kelima prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat lapisan bawah atau miskin (*grass-roots*) mampu memanfaatkan seoptimal mungkin dengan mendayagunakan kekuatan lokal yang pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi ciri khas masyarakatnya.

Pemberdayaan seperti halnya yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan untuk mengentaskan masyarakat dari jeratan

²⁷ *Ibid.*, hlm 149.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 150.

kemiskinan merupakan suatu gebrakan baru dalam strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Berbagai program dalam strategi ini lebih menitik beratkan pada prioritas masyarakat sendiri mengenai berbagai pembangunan yang akan dilakukan melalui musyawarah bersama. Namun perlu diantisipasi mengenai penggunaan dana yang telah digulirkan seringkali tidak digunakan pada tujuan utama pembangunan ekonomi dan perbaikan taraf hidup, melainkan untuk membayar utang, dan lain sebagainya, untuk itulah selain perlu adanya advokasi dari pemerintah.

2. Pemberdayaan Ekonomi Wanita

Memberdayakan wanita merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari budaya Jawa, kemiskinan dan keterbelakangan. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi, yang dimaksud disini adalah perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan makin akan melemahkannya. Dengan kata lain, memberdayakan wanita adalah memampukan dan memandirikan kaum wanita sebagai warga masyarakat yang sejajar dengan kaum pria.²⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

²⁹ *Ibid.*, hlm. 206-207.

Artinya :

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Upaya memberdayakan wanita dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kaum wanita berkembang, dengan bertolak bahwa setiap manusia, pria dan wanita masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh kaum wanita. Hal ini dengan jalan dengan memberikan kesempatan untuk membuka akses pada modal dan pendampingan komunitas. Selain itu, aspek yang penting adalah partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri, keluarga dan masyarakatnya. Dengan adanya berbagai aspek tersebut, strategi pemberdayaan wanita harus mencakup hal-hal pokok-pokok berikut:³⁰

- 1). Harus ada komitmen (*political will*) yang tegas.
- 2). Upaya itu harus terarah (*targeted*). Inilah yang secara populer disebut keberpihakan.

³⁰ *Ibid.*, hlm 208.

- 3). Program itu harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran, yaitu kaum wanita itu sendiri.
- 4). Menggunakan pendekatan kelompok, baik dalam kalangan wanita saja maupun bermitra dengan pria yang juga menjadi sasaran pemberdayaan.

Adanya ketidakberpihakan dan ketidakadilan keikutsertaan kaum wanita dalam proyek pembangunan dimasa lampau, antara lain dipengaruhi lima faktor yang mengarah pada asumsi gender. Pertama terjadi marginalisasi (kemiskinan ekonomi), hal ini misalnya terjadi pada program pertanian Revolusi Hijau yang memfokuskan pada petani laki-laki. Kedua, terjadinya sub ordinasi pada salah satu jenis yang umumnya pada kaum perempuan dengan adanya anggapan bahwa wanita kerjanya didapur atau tidak layak menjadi figur tim pemimpin. Ketiga, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap kaum wanita, bahwa lelaki adalah pencari nafkah (*bread winner*) dan pekerjaan wanita merupakan tambahan belaka. Oleh karenanya wanita boleh dibayar lebih rendah. Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap kaum wanita, adanya sosialisai gender yang telah berkembang menimbulkan *stereotype* bahwa kaum wanita secara fisik lemah dan pria pada umumnya lebih kuat. Kelima, karena peran gender wanita adalah mengelola rumah tangga, banyak wanita menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Sosialisasi peran gender tersebut menjadi tradisi dan telah mengakar dimasyarakat,

akibatnya dikalangan kaum wanitapun menjadikan rasa bersalah jika tidak melaksanakannya.³¹

Solusi kaum wanita agar mampu bersaing dalam dunia yang penuh persaingan bebas tersebut, maka diperlukam program “*Women in Development*”, yakni dengan kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan kaum wanita agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan.³² Searah dengan itu pemerintah mencanangkan Program Pengembangan Kecamatan. Dengan memasukan peran serta wanita kedalam Program Pengembangan Kecamatan melalui program pinjaman bergulir usaha ekonomi produktif merupakan salah satu wujud nyata adanya dukungan terhadap program “*women in development*” di Indonesia.

Kaum wanita juga dapat berperan sebagai tenaga pendamping, yang bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai pemandu (fasilitator), penghubung (komunikator), serta penggerak (dinamisor). Selain itu, sebagai tenaga pendamping, kaum wanita harus siap bekerja purnawaktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, serta membantu kelompok dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.³³ Dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, sesuai dengan apa yang dikemukakan diatas juga melibatkan kaum wanita sebagai fasilitator desa maupun

³¹ Mansur Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Cet. I, April, 2001), hlm. 171-174.

³² *Ibid.*, hlm. 167.

³³ Kartasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 212-213.

kedudukan lain yang menyangkut Program Pengembangan Kecamatan. Hal ini makin membuktikan bahwa sebenarnya kaum wanita memiliki potensi untuk maju dan berkembang.

Dalam rangka menunjang upaya pelaksanaan pemberdayaan ekonomi menurut Ginanjar Kartasasmita, dibutuhkan peran administrasi sebagai suatu pendekatan yang dinamis. Bertitik tolak dari teori pokok manajemen, administrasi tersebut terdiri dari:

a. Perencanaan

Hal ini sangat berguna dan berpengaruh terhadap rencana yang akan dilakukan. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat harus meliputi pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, mengenali masalah mendasar yang menyebabkan kesenjangan; kedua, mengidentifikasi alternatif untuk memecahkan masalah; dan ketiga, menetapkan beberapa alternatif yang dipilih dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan, serta potensi yang dapat dikembangkan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, kegiatan yang dilaksanakan harus terarah, menguntungkan masyarakat yang lemah, terbelakang dan tertinggal. Kedua,

pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dimulai dengan pengenalan apa yang ingin dilakukan. Ketiga, upaya pemberdayaan menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama (kooperatif) yang dibentuk atas dasar wilayah, jenis usaha maupun kesamaan latar belakang. Keempat, menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam hal ini adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain sebagainya.

c. Pengawasan dan Umpan Balik

Hal ini sangat besar peranannya, karena sebagai konsep upaya ini merupakan pengalaman yang relatif baru bagi birokrasi dan masih belum dipahami secara luas, bahkan mudah diselewengkan. Dapat saja yang terjadi sebaliknya, birokrasi bukan memberdayakan, tetapi memperdayakan masyarakat.

d. Koordinasi

Lemahnya koordinasi sangat merugikan karena akan mengakibatkan pemborosan sumber daya, bahkan bila tidak terkoordinasi akan terjadi tabrakan, sehingga mengakibatkan kegagalan.³⁴

3. Tinjauan Program Pengembangan Kecamatan³⁵

a. Latar Belakang

Upaya penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat merupakan wujud komitmen

³⁴ Ginanjar Kartasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 161-168.

³⁵ Depdagri, *Op. Cit.*, hlm 1-3.

pemerintah dalam rangka merealisasikan kegiatan sosial bagi masyarakat. Program Pengembangan Kecamatan merupakan wujud nyata menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

PPK menitik beratkan pada upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan serta perluasan pilihan kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Melalui PPK, masyarakat didorong dan dikuatkan untuk mengorganisir dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan didaerahnya secara musyawarah. Dalam pelaksanaannya mengacu pada asas PPK yaitu: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM).

Pada gilirannya pengembangan konsep PPK ini juga diarahkan pada penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara garis besar proses kegiatan dalam PPK pada hakekatnya memiliki dua dimensi. Pertama, memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Kedua, menyediakan dukungan iklim yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan.

b. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan PPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian, kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam upaya pembangunan serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus PPK adalah sebagai berikut: Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian. Kedua, meningkatkan peran wanita dalam pengambilan keputusan pembangunan. Ketiga, mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipasi. Keempat, meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana, ekonomi, pendidikan dan atau kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

c. Sasaran

Sasaran utama PPK adalah kelompok penduduk miskin pedesaan pada kecamatan miskin, peringkat kemiskinan, indeks kualitas pelayanan kesehatan juga sarana dan prasarana ekonomi.

d. Prinsip-prinsip PPK

1). Keberpihakan kepada orang miskin

Setiap kegiatan yang dilaksanakan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan bagi kelompok miskin.

2). Transparansi

Dalam pengelolaan kegiatan PPK harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Transparansi bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam:

- a). Mengambil keputusan yang berkaitan dengan PPK, misalnya dalam penentuan jenis kegiatan dan pengelolaan dana PPK.

- b). Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus yang menyangkut PPK.
- c). Menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.
- d). Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPK.
- e). Meningkatkan kepercayaan diantara sesama pelaku PPK.

3). Partisipasi

Adanya keterlibatan masyarakat terutama kelompok miskin dan kelompok wanita dalam pengambilan keputusan tentang alokasi dana PPK melalui musyawarah antar desa. Partisipasi wanita pada tahap perencanaan, dengan cara ikut musyawarah dalam penentuan jenis kegiatan yang akan dijalankan melalui program PPK. Selain itu, kelompok wanita juga berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan maupun evaluasi program.

4). Desentralisasi

Adanya pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya yang otonom untuk mengelola PPK secara mandiri dan partisipatif. Bentuk wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam PPK adalah:

- a). Manfaatkan dan mengelola dana PPK.
- b). Memperoleh hak pendampingan.
- c). Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhannya.

- d). Mempertanggungjawabkan pengelolaan dana PPK.
 - e). Memelihara dan melestarikan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 5). Kompetisi sehat.

Pengambilan keputusan dalam PPK harus melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat, yakni:

- a). Mengutamakan pilihan berdasar kebutuhan atau persoalan dimasyarakat.
 - b). Menghindari dominasi dari individu atau kelompok.
 - c). Mengutamakan keterlibatan masyarakat pada proses pembuatan keputusan.
 - d). Unsur aparat dan konsultan hanya bertindak sebagai fasilitator.
4. Kerangka Teoritik tentang Respon

Menurut Scheerer, respon (balas) adalah proses pengorganisasian rangsang. Menurut Hunt (1962), orang dewasa telah mempunyai sejumlah besar unit untuk memproses informasi-informasi. Unit-unit ini dibuat khusus untuk menangani representasi fenomenal dari keadaan di luar yang ada dalam diri seorang individu (internal environment). Lingkungan internal ini dapat digunakan untuk memperkirakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar.³⁶

³⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, cet. I, 1984), hlm. 93.

Secara garis besar respon interpersonal terbagi dalam dua kelompok yaitu konfirmasi dan diskonfirmasi.³⁷ Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Konfirmasi: diartikan sebagai peneguh, penegas atau penguatan.

Konfirmasi terbagi menjadi beberapa macam cara sebagai berikut:

- 1) Pengakuan langsung (*direct acknowledgement*): merupakan penerimaan pernyataan dengan memberikan respon segera.
- 2) Perasaan Positif (*positive feeling*): pengungkapan perasaan yang positif terhadap apa yang sudah disampaikan.
- 3) Respon meminta keterangan (*clarifying response*): peneguhan pesan dengan cara meminta keterangan lebih lanjut.
- 4) Respon setuju (*agreeing response*): peneguhan terhadap informasi yang didapat dengan menyatakan lebih lanjut.
- 5) Respon suportif (*supportive response*): hal ini berupa ungkapan pengertian atau dukungan.

b. Diskonfirmasi: diartikan sebagai ungkapan atau perilaku tidak respon terhadap informasi yang disampaikan.

- 1) Respon sekilas (*tangential response*): memberikan respon tapi kemudian mengalihkan pembicaraan.
- 2) Respon impersonal (*impersonal response*): memberikan komentar dengan memberikan kata ganti orang ketiga.

³⁷ Tubbs dan Moss, *Human Communication: An Interpersonal Perspektif*, (New York: Raandom House, 1974), hlm.259-298. Dikutip dari Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 21, Juli 2004) hlm. 127-128.

- 3) Respon kosong (*impervious response*): respon yang tidak memberikan respon verbal ataupun nonverbal.
- 4) Respon yang tidak relevan (*irrelevant response*); mengalihkan pembicaraan, bahkan tidak ada hubungan dengan pokok pembicaraan.
- 5) Respon interupsi (*interrupting response*): memotong pembicaraan dan mengalihkan pembicaraan.
- 6) Respon rancu (*incoherent response*): merespon tapi dengan kalimat yang rancu atau tidak lengkap.
- 7) Respon kontradiktif (*incongruous response*): penyampaian pesan verbal yang bertentangan dengan pesan verbal, misal: mengatakan sesuatu baik tapi dengan bibir mencibir.

Berkaitan dengan respon (balas) terhadap pengaruh-pengaruh sosial, Willis (1964, 1965) menyebut teori ini dengan model. Menurut Willis model hanya memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang nyata (possibilities) yang benar-benar terjadi. Konsep yang pokok dalam teori Willis adalah konformitas (*conformity*). Akan tetapi Willis kurang setuju dengan definisi yang berlaku umum tentang konformitas, yaitu bahwa konformitas adalah persetujuan dengan mayoritas. Willis mengusulkan definisi baru yang mengandung dua unsur, yaitu : selaras (*congruence*) dan gerak (*movement*). Selaras dimaksudkan kesamaan antara respon oleh individu dengan respon yang secara sosial dianggap “benar”. Sedangkan

gerak adalah perubahan respon dalam kaitannya dengan standar sosial.

Willis mengemukakan 4 modus (cara) dari respon sosial yaitu :

- a. Konformitas: perilaku konformitas adalah usaha terus menerus dari individu untuk selalu selaras dengan norma atau aturan yang diharapkan oleh kelompok. Kalau persepsi individu tentang norma kelompok (standar sosial) berubah, maka ia akan mengubah pula tingkah lakunya.
- b. Ketidak-tergantungan (*independence*): perilaku individu yang tidak membiarkan respon-responnya dipengaruhi oleh standar sosial tersebut.
- c. Anti konformitas (*anti – conformity*) : perilaku yang merupakan respon (tanggapan) terhadap norma-norma, akan tetapi arahnya berlawanan dengan norma-norma itu (perilakunya tidak benar).
- d. Variabilitas (*variability*): perilaku yang berubah-ubah tidak ditentukan oleh standar sosial dan standar sosial tidak diberi nilai apapun oleh individu.³⁸

Konformitas merupakan produk interaksi antara faktor-faktor situasional dan faktor-faktor personal. Faktor-faktor situasional yang menentukan konformitas adalah kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok dan tingkat kesepakatan kelompok. Cara individu menyatakan

³⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Op.Cit.*, hlm.229-230.

penilaian dan perilakunya juga berkaitan dengan konformitas. Umumnya, bila individu harus menyatakan responnya secara terbuka, ia cenderung melakukan konformitas daripada kalau ia dapat mengungkapkannya secara rahasia.³⁹

Beberapa penelitian di Amerika (Argyle, 1957; Gerard, 1964; Mouton, Blake dan Olmstead, 1956), menyatakan bahwa orang Amerika lebih berani berbeda pendapat ketika pendapat mereka dirahasiakan daripada ketika pendapat mereka diketahui kelompoknya. Para psikolog kemudian membedakan antara kesepakatan publik (*public compliance*) dan kesepakatan privat (*private acceptance*), keduanya jarang sama.⁴⁰

Selain faktor-faktor situasional tersebut, faktor lain yang berkaitan dengan konformitas adalah faktor personal. Faktor personal meliputi: usia, jenis kelamin, stabilitas emosional, kecerdasan, motivasi dan harga diri. Pada umumnya, makin tinggi usia anak makin mandiri sehingga tidak bergantung pada orang tua, dan makin kurang kecenderungannya untuk konformitas. Orang yang emosinya kurang stabil lebih mudah melakukan konformitas. Kecerdasan berkorelasi negatif dengan konformitas, artinya makin tinggi kecerdasan makin kurang kecenderungan ke arah konformitas. Motif berprestasi, aktualisasi diri, dan konsep diri yang positif menghambat konformitas.⁴¹

³⁹ Jalaludin, *Op.Cit.*, hlm. 152-153.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm.154.

Konformitas tidak selalu jelek, juga tidak selalu baik. Untuk nilai-nilai sosial dan kebersihan moral, diperlukan konformitas. Tetapi untuk perkembangan pemikiran, untuk menghasilkan hal-hal yang baru dan kreatif, konformitas merugikan. Alternatifnya bukan nonkonformitas (selalu tidak setuju), melainkan kemandirian (*independence*). Mandiri bukan menentang kelompok, melainkan bersedia untuk berbeda pendapat.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber memperoleh keterangan penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah mereka yang memegang kunci atau peranan penting pada kepengurusan PPK (Program Pengembangan Kecamatan), diantaranya: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Fasilitator Kecamatan Teknik, Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi, Unit Pengelola kegiatan (UPK) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan pemberdayaan wanita melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan respon masyarakat yang mengikuti program tersebut, mengenai keikutsertaan wanita dalam

⁴² *Ibid.*

⁴³ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 92.

program pengembangan kecamatan di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang relevan dengan penelitian, yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut;

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴⁴ Dalam penelitian ini teknik observasi yang dipakai adalah observasi partisipan yaitu dengan mengamati dan mencatat mengenai partisipasi wanita dalam rangka kegiatan pemberdayaan dengan ikut berpartisipasi ikut dalam pertemuan antar kelompok. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan ekonomi wanita dalam Program Pengembangan Kecamatan.

b. Metode Interview

Metode interview adalah metode dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi data wawancara.⁴⁵ Bentuk wawancara yang dipakai adalah interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁴⁶

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 126.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

Metode interview ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah, visi, misi, program kerja, keorganisasian PPK, kepengurusan tim PPK, pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan melalui PPK, respon masyarakat terhadap PPK. Informan dalam interview ini adalah Penanggung Jawab Operasional kegiatan (PJOK), Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Fasilitator Kegiatan (FK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan antara lain; catatan, buku, peraturan, perundang-undangan dan sebagainya.⁴⁷ Data ini untuk mendukung dan melengkapi data-data penelitian. Metode dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadministrasian, berupa: Buku Pedoman PPK dari Departemen Dalam Negeri, Buletin PPK, Makalah Lokakarya PPK se-Kabupaten Boyolali, dan catatan lainnya yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah, program kerja dan keorganisasian PPK di Kecamatan Karanggede.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dalam menganalisa data penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah tahapan analisa data: Pertama, mempelajari data dengan menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada pada data. Kedua, menemukan tema-tema yang berasal dari data. Ketiga, menuliskan model yang ditemukan. Keempat, koding yang telah dilakukan.⁴⁸

Konsep analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang tidak penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴⁹ Dalam penelitian ini akan diuraikan secara analitis mengenai pelaksanaan PPK dan respon masyarakat terhadap keikutsertaan wanita dalam program tersebut.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang berlainan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan:

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 297.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁰



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 330-331.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sampai saat sekarang ini masih ada masyarakat yang memberikan persepsi negatif kepada wanita, seperti penilaian bahwa wanita tidak produktif dan tidak mempunyai skill. Sikap tersebut justru menempatkan mereka pada posisi yang diskriminatif dan tidak memberikan keadilan. Sehingga aksesibilitas wanita juga sulit untuk didapatkan demi kelancaran mereka dalam melakukan berbagai aktivitas.

Dari beberapa persoalan wanita seperti ini, maka dibutuhkan kesadaran bersama baik dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan bagi mereka yang sebenarnya telah lama didambakannya. Pemberdayaan di sini dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemampuan kepada wanita agar dapat berusaha, bertindak dan berbuat demi mempertahankan hak-haknya yang diperoleh secara adil sesuai dengan fitrah manusia, sehingga dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wanita.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif wanita dan respon masyarakat yang mengikuti program terhadap keikutsertaan wanita dalam Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif wanita

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PPK terhadap wanita dengan menggunakan beberapa langkah yaitu; kebijakan PPK yang terdiri dari manajemen pelatihan pelaku PPK, pelatihan untuk pengembangan kapasitas masyarakat, sosialisasi, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program. Peningkatan sumberdaya wanita diantaranya dengan mengikutsertakan partisipasi wanita dalam program. Langkah pemberdayaan ekonomi wanita yang dilakukan oleh PPK ini merupakan langkah yang cukup baik, karena langkah yang diterapkan oleh PPK adalah satu-kesatuan yang integral untuk merubah kehidupan ekonomi wanita ke arah yang lebih baik.

2. Respon masyarakat yang mengikuti program terhadap keikutsertaan wanita dalam Program Pengembangan kecamatan

Masyarakat menyambut antusias keberadaan Program Pengembangan Kecamatan. Keikutsertaan wanita dalam program, berdasarkan berbagai tanggapan masyarakat, mampu memberikan stimulan dalam rangka pengembangan potensi diri dan kegiatan ekonomi karena adanya dana dari PPK guna menunjang perekonomian kelompok wanita miskin di Kecamatan Karanggede. Masyarakat banyak yang berharap keberlangsungan program guna menunjang perekonomian masyarakat miskin khususnya kelompok wanita. Pemberian wewenang kepada kelompok wanita miskin untuk dapat mengembangkan potensi akan menumbuhkan suatu kemandirian.

Kebijakan sebagai langkah awal dalam pemberdayaan ekonomi wanita. Langkah ini dimaksudkan untuk melakukan pendampingan wanita, dengan memberikan arahan kepada mereka untuk menemukan jati dirinya. Dengan menemukan jati dirinya, mereka akan tumbuh rasa percaya diri untuk menentukan arah hidup mereka, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Setelah wanita didampingi, maka PPK memberikan pengetahuan dan bantuan dana untuk meningkatkan potensi yang mereka miliki melalui pinjaman dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Kegiatan pelatihan juga dapat dilakukan melalui PPK, jika memang diperlukan dan diusulkan oleh masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Saran-saran bagi PPK Kecamatan Karanggede:

- a. Demi untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi wanita, khususnya wanita di Kecamatan Karanggede, teruskan perjuangannya dan kekonsistenan PPK.
- b. Dalam melakukan pemberdayaan dibutuhkan suatu kesabaran, ketabahan dan ketekunan, agar program yang dilakukan dapat terealisasi dengan baik. Hal yang tak kalah penting adalah konsisten terhadap program yang direncanakan demi keberhasilan pemberdayaan lebih-lebih pemberdayaan terhadap masyarakat miskin.
- c. PPK hendaknya mengadakan mitra usaha untuk menjalin hubungan kerja sama (*net working*) dengan pihak-pihak yang dapat membantu

kelancaran program dengan mendatangkan tenaga ahli. Hal ini juga dimaksudkan agar jalinan kerja sama semakin luas.

2. Saran-saran bagi Pemerintah Kecamatan Karanggede:

- a. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan dari Program Pengembangan Kecamatan akan segera terwujud apabila didukung situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat miskin untuk berkembang, maka hendaknya Pemerintah Kecamatan Karanggede memberikan dukungan yang kondusif terhadap keberlangsungan program tersebut.
- b. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan berkembang, Pemerintah Kecamatan Karanggede hendaknya memberikan semangat dan dorongan kerjasama terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan yang ada di Kecamatan Karanggede, diantaranya Program Pengembangan Kecamatan dengan program pemberdayaan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan.

C. Penutup

Skripsi yang telah tersusun ini, penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum memenuhi kriteria penulisan yang baik serta masih banyak kekurangan-kekurangan baik yang berkaitan dengan kerangka pikir sistematis penulisan, maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang konstruktif dan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan tulisan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Abimanyu, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: PAU – SE UGM, 2000)
- Atho' Mudzhar, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, Cet. I, 2001)
- Dadang S. Anshori, *Memperbincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet I, 1997)
- Depdagri, *Forum-forum Musyawarah PPK*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002)
- _____, *Pedoman Fasilitasi dan Pelatihan PPK*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK Tahun 2002)
- _____, *Petunjuk Teknis Operasional PPK*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002)
- _____, *Sosialisasi*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002)
- _____, *UPK, Penyaluran dan Administrasi Kegiatan*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002)
- Ginancar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: CESINDO, Cet. I, 1996)
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998)
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan dan Implementasi*, (Bandung: Humaniora Utama Press, Cet. I, 2001)
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 21, 2004)
- Loekman Soetrisno, *Pemberdayaan Rakyat Dalam Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2000)
- Mansur Fakhri, *Analisis Gender Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- _____, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Cet.III, November 2003)

- Moelyanto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996)
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)
- Mosse, J. C terjemahan Hartian.W, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila; Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, Cet. I, 1997)
- , *Ekonomi Rakyat: Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996)
- Onny S. Prijono, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, Cet. I, 1984)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III, 2004)
- Sutarto, *Dasar-dasar organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. VIII, 1996)
- Suara Merdeka, *Program Pengembangan Kecamatan Boyolali Phase I*, Rabu 19 februari 2003
- Dokumen Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi, Ketentuan PPK Fase II Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan
- Dokumen Laporan Bulan April PPK Kecamatan Karanggede, 2004

Dokumen Laporan Bulan Januari PPK Kecamatan Karanggede, 2004

Dokumen Laporan Bulan Maret PPK Kecamatan Karanggede, 2004

Dokumen Sambutan Bupati Boyolali Dalam Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan
PPK Tahap II Tahun 2003



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA